

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Desa

Desa Hiligara adalah nama sebuah wilayah di Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli. Desa Hiligara bermula dari sebuah kampung adat yang didirikan oleh seseorang yang bernama Ama Gamasi Lase alias Ngetumbanua (gelar Kepala Kampung Adat) pada masa koloni Belanda. Beliau mempunyai 3 (tiga) anak kandung, yaitu : Ama Gafaelu Lase, Ama Lidia Lase dan Ama Lona Lase. Setelah meninggalnya Ama Gamasi Lase maka gelar Kepala Kampung Adat diteruskan oleh anaknya yang paling tua atas nama Ama Gafaelu Lase alias Bawa Duha (gelar kepala kampung adat Hiligara) pada masa dulu. Pada masa pemeritahan koloni Belanda, maka dibentuklah sistem pemerintahan di desa dan yang terpilih sebagai kepala kampung pada saat itu adalah Ama Gafaelu Lase (Bawa Duha) yang sedang memimpin kampung Adat Hiligara dan sekaligus nama tersebut dipakai sebagai nama kampung pemerintahan di desa tersebut yaitu Kampung Hiligara (Desa Hiligara). Seiring dengan perkembangan zaman maka kampung pemerintahan yang dulunya dinamai Kampung Hiligara kemudian namanya beralih menjadi Desa Hiligara hingga saat ini.

Sejak dibentuknya pemerintahan kampung yang kemudian secara resmi dikenal dengan nama Desa Hiligara, struktur kepemimpinan di wilayah tersebut telah mengalami dinamika dan pergantian sebanyak 13 kali. Pada awalnya, pemimpin desa dikenal dengan sebutan Kepala Kampung, yang seiring perkembangan regulasi pemerintahan desa kemudian berubah penyebutannya menjadi Kepala Desa. Pergantian kepemimpinan ini tidak hanya mencerminkan kesinambungan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, tetapi juga menunjukkan adanya proses regenerasi kepemimpinan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pembangunan masyarakat desa. berikut disajikan daftar nama-nama

Kepala Desa Hiligara sejak masa awal berdirinya hingga kepemimpinan pada periode sekarang:

Tabel 4.1

Daftar Nama - Nama Kepala Desa Hiligara

No	Nama Kepala Desa
1	Ta'osisi Lase
2	Kilimbowo Lase
3	Ama Zamia Lase
4	Zuludi Lase
5	Tongoni Lase
6	Sawato Lase
7	Sarosokhi Lase
8	Elizaro Lase
9	Folo'o Lase
10	Ya'aro Lase
11	Bezisokhi Lase
12	Sozanolo Lase
13	Pj. Notatema Lase

Sumber ; Pemerintah Desa Hiligara 2025

Adapaun Profil desa berikut ini yang mencakup tentang data demografi , alamat kantor desa, luas wilayah, kode pos dan kode kemendagri Desa Hiligara sebagai berikut ;

Tabel 4.2
Profil Desa Hiligara

Desa Hiligara	
Negara	Republik Indonesia
Provinsi	Sumatra Utara
Kota	Gunungsitoli
Kecamatan	Gunungsitoli Selatan
Alamat Kantor Desa	Jl. Desa Hiligara KM. 12,5 Desa Hiligara
Kode Pos	22851
Kode Kemendagri	12.78.02.2011.
Luas Wilayah	2,82 km ²
Demografi	Data penduduk Desa Hiligara laki-laki 342 dan perempuan 370 total keseluruhan penduduk mencapai 712 jiwa dengan kepadatan penduduk 221,99 jiwa/ km ²

Sumber ; Pemerintah Desa Hiligara 2025

4.1.2 Visi Dan Misi Desa Hiligara

Desa Hiligara Berada dibawah naungan lembaga pemerintahan desa yang dengan ketentuan sebagai pemangku kepentingan dalam mengurus wilayah dan aspek aspek lainnya menyangkut kepentingan masyarakat, Maka dari itu pemerintahan desa Hiligara membentuk sebuah visi dan misi dalam menjalankan roda pemerintahannya sebagai berikut :

a) Visi :

Melayani masyarakat Desa Hiligara secara menyeluruh tanpa membedakan demi terwujudnya Desa Hilihara yang maju, mandiri dan sejahtera serta mengedepankan kepentingan umum (masyarakat) diatas kepentingan pribadi.

b) Misi :

1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi terciptanya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Melanjutkan membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan jalur menjalin hubungan yang baik pada instansi pemerintah.

3. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Hiligara dan mengfungsikan sesuai bidangnya masing-masing sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga yang ada di desa demi terwujudnya cita-cita dan harapan bersama.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Hiligara dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa dalam berbagai kegiatan.
6. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta dapat dipertanggungjawabkan.
7. Mengfungsikan fasilitas-fasilitas yang ada di Desa Hiligara termasuk tempat pendistribusian beras raskin dimana selama ini bangunan pemerintah yang ada di Desa Hiligara tidak dipergunakan untuk pendistribusian beras raskin.

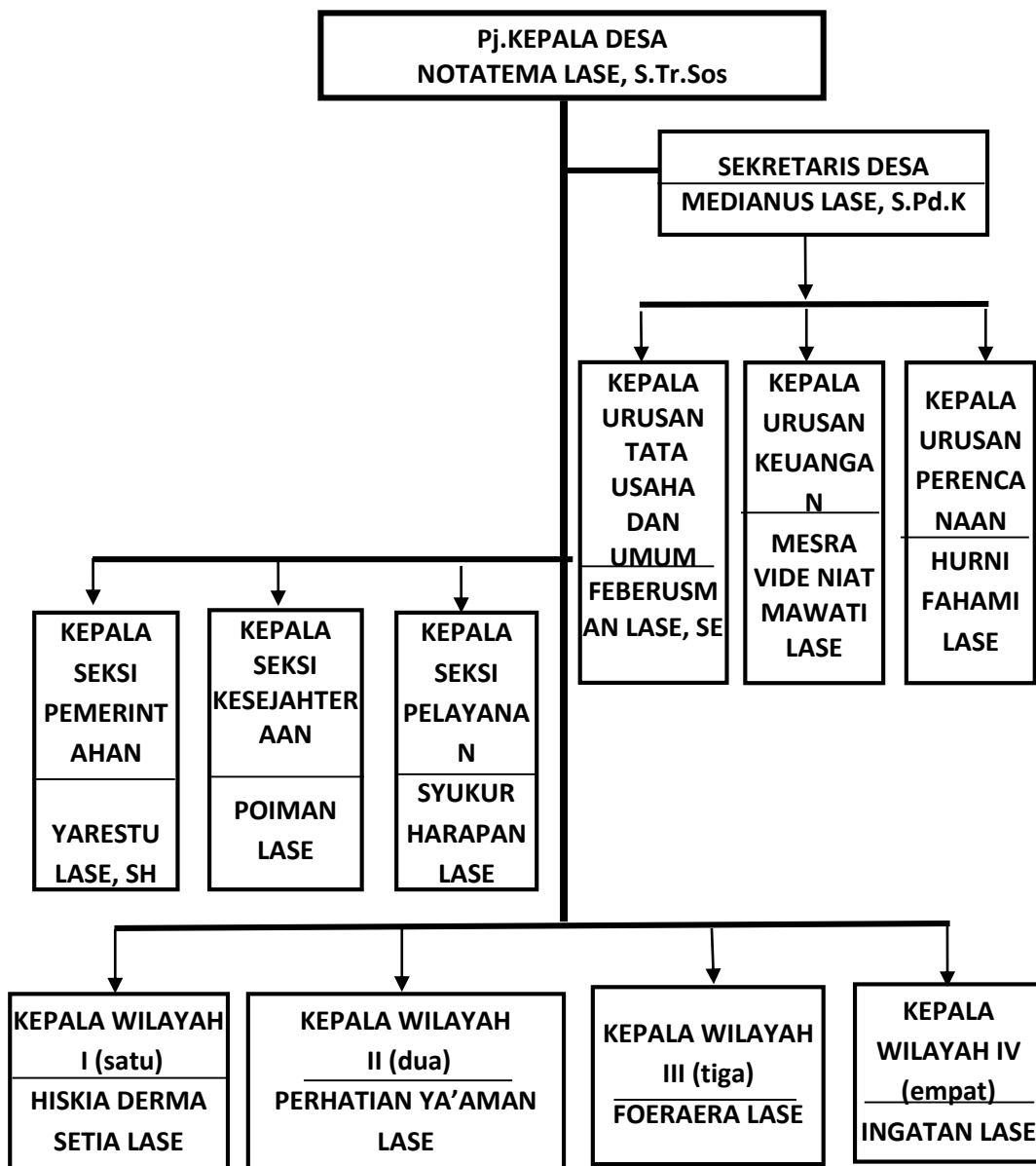
4.1.3 Struktur Pemerintahan Desa Hiligara

Dalam setiap organisasi, baik yang berbentuk lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, keberadaan struktur organisasi yang jelas dan teratur merupakan aspek fundamental dalam mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi berperan sebagai kerangka dasar yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di antara anggota organisasi, sehingga setiap individu memiliki kejelasan mengenai posisi serta peran yang harus dijalankan.

Lebih lanjut, struktur organisasi juga mencerminkan hubungan kerja yang terjalin secara vertikal, yaitu antara pimpinan dengan bawahan, serta secara horizontal, yaitu antar anggota yang memiliki kedudukan sejajar. Hubungan kerja tersebut penting untuk menciptakan koordinasi yang harmonis, meningkatkan efektivitas komunikasi, dan mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Dengan demikian, struktur organisasi bukan hanya sebatas susunan hierarki, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan seluruh program kerja dapat diimplementasikan secara sistematis, terarah, dan efisien. Struktur yang baik akan memperkuat manajemen organisasi, mendukung pencapaian visi dan misi, serta meningkatkan produktivitas baik pada sektor pemerintahan maupun swasta.

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Hiligara



Sumber : Pemerintah Desa hiligara 2025

4.2 Job Description Pemerintah Desa Hiligara

Pemerintah Desa Hiligara terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa yang memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung kelancaran roda pemerintahan serta pembangunan desa. Berikut uraian tugas pokok:

1. Kepala Desa: Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, bertanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi, serta menjadi pengambil kebijakan dalam berbagai bidang di desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan yang keanggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
3. Sekretaris Desa: Membantu administrasi umum, pengarsipan, dan koordinasi internal antara kepala desa dengan perangkat lainnya.
4. Kepala Urusan (Kaur): Bertugas melaksanakan kegiatan operasional, seperti urusan keuangan, perencanaan, dan tata usaha serta umum.
5. Kepala Seksi (Kasi): Melaksanakan kegiatan teknis lapangan sesuai bidang, seperti pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan umum.
6. Kepala Wilayah: Mengoordinasikan urusan kemasyarakatan dan menyampaikan informasi dari dan kepada warga pada wilayah masing-masing (dusun).
7. Perangkat desa adalah staf yang membantu tugas tugas administratif disekretariat desa atau pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.

4.3 Deskripsi Informan

Dalam penelitian ini, informan dibagi menjadi tiga kategori: informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Mereka dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dengan topik penelitian serta perannya dalam pemerintahan desa atau sebagai bagian dari masyarakat.

Tabel 4.3
Identitas Informan Kunci

Nama Informan	Usia Informan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
Notatema Lase, S.Tr.Sos	36 Tahun	S-1	ASN Merangkap Pj. Kepala Desa

Sumber ; Olahan Peneliti 2025

Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan paling luas, mendalam, dan relevan terhadap topik penelitian. Biasanya, mereka adalah aktor utama dalam sistem yang diteliti dan menjadi sumber informasi utama bagi peneliti.

Karakteristik:

- Memiliki posisi strategis dalam komunitas atau lembaga (misal: kepala desa, pimpinan organisasi).
- Mengetahui seluk-beluk persoalan yang diteliti.
- Dapat memberikan informasi secara utuh dan objektif.

Dalam penelitian ini yang menjadi Informan kunci adalah Notatema Lase, seorang ASN yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa Hiligara. Dianggap sebagai sumber utama karena mengetahui secara langsung bagaimana peran pemerintah desa dalam menghadapi perubahan budaya gotong royong.

Tabel 4.4
Identitas Informan Utama

Nama Informan	Usia Informan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan

Hurni Fahami Lase	43 Tahun	SLTA	Perangkat Desa
Medianus Lase, S.Pd.K	40 tahun	S-1	Perangkat Desa
Yarestu Lase, Sh	40 Tahun	S-1	Perangkat Desa
Syukur Harapan Lase, S.P.d.	35 Tahun	S-1	Perangkat Desa

Sumber ; Olahan Peneliti 2025

Informan utama adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam aktivitas atau struktur yang diteliti dan memiliki pengalaman serta pengetahuan praktik terkait fenomena yang diteliti.

Karakteristik:

- Aktor pelaksana atau bagian dari sistem/pemerintahan/organisasi.
- Berperan aktif atau langsung berinteraksi dalam topik penelitian.
- Memberikan data pendukung yang memperkuat informasi dari informan kunci.

Yang menjadi Informan utama dalam penelitian ini adalah para perangkat desa, yaitu:

- Hurni Fahami Lase (Kaur Perencanaan)
- Medianus Lase (Sekretaris Desa)
- Yarestu Lase (Kasi Pemerintahan)
- Syukur Harapan Lase (Kasi Pelayanan)

Mereka adalah pelaksana teknis lapangan dalam kegiatan gotong royong dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Tabel 4.5
Identitas Informan Pendukung

Nama Informan	Usia Informan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
Ledisi Pasaribu	52 Tahun	SLTP	IRT
Darius Lase	41 Tahun	SLTA	Guru
Yustinus Lase	53 Tahun	SLTA	Petani

Sumber ; Olahan Peneliti 2025

Informan pendukung adalah warga masyarakat biasa atau pihak luar sistem pemerintahan yang dapat memberikan pandangan, persepsi, dan pengalaman mereka sebagai penerima kebijakan atau pelaku budaya yang diteliti.

Karakteristik:

- Tidak terlibat dalam sistem formal tetapi mengalami dampak langsung dari kebijakan atau program.
- Memberikan sudut pandang masyarakat umum.
- Bersifat melengkapi dan memvalidasi informasi dari informan utama dan kunci.

Informan pendukung adalah warga Desa Hiligara, yaitu:

- Ledisi Pasaribu (IRT)
- Darius Lase (Guru)
- Yustinus Lase (Petani)

Mereka memberikan pandangan dari sisi masyarakat, bagaimana mereka melihat dan menilai perubahan budaya gotong royong, serta bagaimana respons mereka terhadap program desa.

4.4 Temuan Penelitian

Setelah melalui beberapa tahapan terkait penjelasan tentang hal yang melatar belakangi penelitian dimulai dari observasi mengenai fenomena yang terjadi , Pengumpulan teori-teori untuk memperkuat argumentasi yang berkaitan langsung dengan penelitian, hingga pada metode penelitian yang digunakan. Pada bab ini akan dijabarkan hasil penelitian yang dikumpulkan atas dasar observasi, wawancara, dan dokumentasi yang secara mendalam yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap informan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi di Desa Hiligara selama Juni hingga Juli 2025 yang dilakukan pada desa Hiligara terkait dengan judul penelitian tentang “Peran Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Perubahan Budaya Gotong Royong Di Desa Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugyono, (2016) pada bukunya yang membahas tentang Metodologi Penelitian Kualitatif :

”Bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dari segi penelitian ini, para peneliti masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan dengan berbagai metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlaku pada saat ini di lapangan yang dijadikan objek penelitian, kemudian data atau informasinya di analisis sehingga diperoleh suatu pemecahan masalah.”

Tahapan berikutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menyusun beberapa daftar pertanyaan wawancara terkait topik penelitian yang nantinya akan ditanyakan langsung kepada informan kunci dan informan pendukung yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya untuk dapat mengetahui

bagaimana peran pemerintah desa dalam menghadapi budaya gotong royong dilokasi penelitian yaitu Desa Hiligara. Peneliti menetapkan Kepala Desa sebagai informan kunci selaku pimpinan pemerintahan desa, perangkat desa sebanyak 4 orang ditetapkan sebagai informan utama yang terdiri dari (sekretaris desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan dan kepala urusan perencanaan) dan masyarakat sebanyak 3 orang yang ditetapkan sebagai informan pendukung (perwakilan dari masyarakat Desa Hiligara).

Tabel 4.6
Jadwal Wawancara

Nama Informan	Tanggal	Tempat Wawancara
Notatema Lase, S.Tr.Sos	04/07/2025	Kantor Desa
Medianus Lase, S.Pd.K	04/07/2025	Kantor Desa
Yarestu Lase, Sh	04/07/2025	Kantor Desa
Syukur Harapan Lase, S.P.d.	04/07/2025	Kantor Desa
Hurni Fahami Lase,	04/07/2025	Kantor Desa
Ledisi Pasaribu	05/07/2025	Desa Hiligara
Darius Lase	11/07/2025	Desa Hiligara
Yustinus Lase	07/07/2025	Desa Hiligara

Sumber ; Olahan Peneliti 2025

Agar wawancara dapat berjalan lebih sistematis maka peneliti membagi kedalam 3 bentuk pembahasan yaitu ;

1. Hasil Penelitian
2. Deskripsi identitas penelitian
 - a. Identitas informan kunci
 - b. Identitas informan utama
 - c. Identitas informan pendukung
3. Pembahasan

Peneliti kemudian melakukan analisis menggunakan tahapan tahapan dalam melakukan observasi , dimana tahapan yang dilakukan antara lain ;

- a. Peneliti mendatangi Kantor Desa Hiligara yang berada di Jln. Desa Hiligara Km. 12,5 .
- b. Mengamati lokasi penelitian serta mengumpulkan data-data yang dirasa perlu terkait topik penelitian

4.5 Teknik Analisa Data

Selanjutnya peneliti melakukan analisis data berdasarkan beberapa rangkaian langkah berikut antara lain ;

1. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dasar observasi langsung oleh peneliti serta melakukan dokumentasi terhadap hasil obeservasi yang diperoleh dari lokasi penelitian di Desa Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan.

2. Reduksi data

Proses pada tahap ini adalah penyederhanaan , pengelolaan dan pemusatan data yang diperoleh selama penelitian untuk mempermudah analisis selama proses penelitian yang dilakukan pada Desa Hiligara.

3. Penyajian data

Proses mengorganisasikan dan menampilkan data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga dapat dipahami dan dianalisis dengan mudah . Penyajian data yang baik membantu peneliti dan pembaca dalam memahami temuan penelitian yang dilakukan pada Desa Hligara

Kecamatan Gunungsitoli Selatan serta mendukung argumen dan kesimpulan yang diambil.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian adalah menginterpretasikan dan menilai temuan data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji fenomena yang telah ditemukan sebelumnya tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Menghadapai Perubahan Budaya Gotong Royong yang berlokasi di Desa Hiligara . Kesimpulan ini didasarkan pada analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah selama penelitian.

Informasi yang didapatkan dari lokasi penelitian berdasarkan beberapa teknik yang telah dijelaskan sebelumnya maka dilakukan tahap-tahap sebagai berikut ;

1. Tahap Pertama pengumpulan data (*Data collection*)

Data yang dikumpulkan kemudian disusun dalam bentuk narasi-narasi sehingga membentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah atau fenomena , hasil observasi dan wawancara yang mendalam yang didapatkan oleh peneliti dan selanjutnya disusun berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan sehingga setiap informasi yang didapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam rumusan tersebut.

2. Tahap kedua reduksi data (*Data reduction*)

Sugiyono 2018 menggambarkan reduksi data sebagai proses merangkum dan memilah elemen penting, memfokuskan pada elemen yang relevan dengan topik penelitian, dan menemukan tema dan pola. Pada akhirnya, proses ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah proses pengumpulan data selanjutnya.

3. Tahap ke tiga penyajian data (*Data display*)

Melakukan interpretasi terhadap data yang telah disampaikan informan mengenai masalah yang diteliti kemudian merampungkan data tersebut secara rapih dan terperinci agar penyusunannya sesuai dengan rumusan

masalah. Data yang telah tersusun tersebut kemudian ditampilkan secara detail agar mudah dipahami.

4. Tahap ke empat penarikan kesimpulan (*Conclusionnverification*)

Pada tahap penarikan kesimpulan peneliti berusaha menarik garis lurus dari seluruh narasi-narasi yang telah disajikan pada tahap ketiga, sehingga menghasilkan sebuah gambaran atau kesimpulan dari pembahasan tentang masalah yang diteliti.

Kesimpulan dari semua data yang telah peneliti kumpulkan kemudian dikaji ulang untuk menentukan validasi temuan yang peneliti peroleh dilapangan. Peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan cara sebagai berikut :

1. Trigulasi Data , menggunakan sumber dan metode pengumpulan data untuk memeriksa keakuratan untuk memeriksa konsistensi dari temuan penelitian.
2. Verifikasi External , meminta masukan dari Teman sejawat , ataupun pihak lain yang independen untuk mengevaluasi hasil dari temuan penelitian.
3. Tinjauan Literatur, membandingkan temuan dan penelitian dari seluruh teori yang ada untuk memperkuat validasi hasil penelitian.

4.6 Hasil Penelitian

Penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Perubahan Budaya Gotong Royong Di Desa Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan Studi Kasus Desa Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan dilakukan dengan teknik wawancara menggunakan purposive sampling , dikarenakan teknik ini mencakup orang orang yang diseleksi menurut kriteria yang dibuat peneliti karna dianggap dapat mewakili untuk menyampaikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan tujuan dari penelitian , peneliti turun langsung kelapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan wawancara dengan menjumpai para informan yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung yang

dimana para informan ini adalah pihak-pihak yang mengetahui tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam menghadapi perubahan budaya gotong royong di Desa Hiligara. Informasi yang dikumpulkan tersebut berguna untuk mengetahui bagaimana kondisi internal dan external sehingga memperoleh data yang akurat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

Selain itu pada bagian ini juga menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi di Desa Hiligara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan. Informan penelitian terdiri dari tiga kategori: informan kunci (Pj. Kepala Desa), informan utama (perangkat desa), dan informan pendukung (warga).

Pendekatan yang digunakan adalah analisis tematik, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema-tema besar yang memudahkan penjelasan secara sistematis.

4.6.1 Pelibatan Masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong bukan hanya sekadar mobilisasi tenaga kerja, melainkan proses membangun rasa memiliki terhadap program desa. Di Desa Hiligara, gotong royong dipandang sebagai sarana mempererat hubungan sosial, meningkatkan solidaritas, dan mempercepat pembangunan desa. Keterlibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan menjadi penting agar program tidak hanya dilihat sebagai inisiatif pemerintah desa, tetapi sebagai kebutuhan bersama.

Berdasarkan wawancara, NL (04/07/2025) menjelaskan bahwa pemerintah desa rutin mengadakan musyawarah desa untuk merencanakan kegiatan gotong royong seperti pembersihan lingkungan, perbaikan jalan, dan pembangunan fasilitas umum. Selanjutnya ML (04/07/2025) menambahkan kegiatan ini dijadwalkan minimal sebulan sekali dan melibatkan tokoh masyarakat agar hasilnya lebih efektif. Kemudian YL (04/07/2025) mengungkapkan pembentukan LPM membantu mendata kebutuhan warga

sehingga kegiatan tepat sasaran. Dan SL (04/07/2025) menegaskan aparat desa memberi teladan dengan turun langsung ke lapangan, disertai penyediaan alat dan logistik. Lalu HL (04/07/2025) menyebut adanya program Jumat Bersih yang diinisiasi Wali Kota Gunungsitoli sebagai wujud komitmen menjaga lingkungan. Serta YL (07/07/2025) menilai pemerintah desa konsisten mengingatkan warga akan pentingnya gotong royong.

Menurut Supriyadi & Hartati, (2022) partisipasi warga akan meningkat jika dilibatkan dalam tahap perencanaan, karena hal ini membangun rasa tanggung jawab kolektif. Penelitian Situmeang, (2021) di Kabupaten Nias Selatan juga menunjukkan bahwa musyawarah desa yang terbuka dan partisipatif dapat meningkatkan kehadiran warga dalam kegiatan sosial hingga 75%.

Di Desa Hilimbowo Laoli, (2024) penggabungan musyawarah desa dengan acara keagamaan mampu menarik partisipasi 80% warga. Praktik serupa dapat diadaptasi di Desa Hiligara untuk meningkatkan keterlibatan warga, terutama generasi muda.

Pelibatan masyarakat yang dilakukan secara rutin, partisipatif, dan disertai keteladanan dari aparat desa menjadi strategi utama dalam mempertahankan budaya gotong royong di Desa Hiligara.

4.6.2 Peran Tokoh Adat dan Lembaga Lokal

Tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga lokal seperti PKK, Karang Taruna, dan LPM berperan penting sebagai penggerak partisipasi warga. Kehadiran mereka memberi legitimasi sosial dan kultural yang sulit digantikan oleh pemerintah desa semata.

Menurut SL (04/07/2025) menyampaikan bahwa kehadiran tokoh adat dalam kegiatan gotong royong membuat warga merasa memiliki kewajiban moral untuk hadir. Kemudian LP (05/07/2025) menambahkan bahwa kaum ibu melalui PKK berperan aktif dalam menyediakan konsumsi dan logistik.

Menurut Arnstein, (2019) dalam konsep *Ladder of Citizen Participation* menyebut bahwa partisipasi efektif terjadi ketika masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Penelitian Amali & Fotani, (2021) membuktikan bahwa kolaborasi pemerintah desa dan tokoh adat mampu meningkatkan partisipasi warga hingga 60%.

Di Desa Bawolato Harefa, (2023) tokoh adat memimpin kegiatan gotong royong besar seperti perbaikan jalan desa dan renovasi rumah ibadah, yang meningkatkan rasa persatuan di masyarakat.

Pelibatan tokoh adat dan lembaga lokal tidak hanya memperkuat partisipasi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian nilai budaya gotong royong bagi generasi mendatang.

4.6.3 Kendala Ekonomi

Kendala ekonomi menjadi salah satu penyebab menurunnya partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong. Kebutuhan untuk bekerja demi penghasilan harian sering kali membuat warga sulit meluangkan waktu untuk kegiatan sosial.

YL (04/07/2025) menyoroti bahwa banyak warga bekerja di luar desa atau di sektor informal dengan penghasilan harian. Selanjutnya LP (05/07/2025) menyebut bahwa kesibukan kerja membuat kaum ibu jarang ikut kerja bakti.

Menurut Putri & Haryono, (2022) partisipasi sosial dipengaruhi oleh ketersediaan waktu dan manfaat langsung yang dirasakan. Laoli, (2024) di Desa Hilimbowo menemukan bahwa warga dengan pekerjaan harian memiliki tingkat partisipasi 30% lebih rendah dibandingkan warga yang bekerja di desa.

Di Desa Botombawo Zebua, (2023) pemberian insentif berupa sembako untuk peserta gotong royong rutin mampu meningkatkan partisipasi sebesar 25%.

Kendala ekonomi dapat menjadi penghalang besar bagi partisipasi warga, namun dapat diatasi dengan strategi penjadwalan yang fleksibel dan insentif yang relevan.

4.6.4 Pengaruh Teknologi

Perkembangan teknologi, terutama media sosial, membawa dampak ganda terhadap budaya gotong royong. Di satu sisi, memudahkan komunikasi dan koordinasi; di sisi lain, mengurangi interaksi tatap muka yang menjadi inti dari kegiatan sosial ini.

ML (04/07/2025) mengakui bahwa komunikasi digital mengurangi intensitas tatap muka antarwarga. Kemudian HL (04/07/2025) menyebut bahwa generasi muda lebih tertarik pada aktivitas daring dibandingkan kerja bakti.

Menurut Iswanto, (2021) menekankan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi sosial jika digunakan untuk koordinasi dan publikasi, bukan sebagai pengganti interaksi langsung.

Di Desa Hilimbowo Laoli, (2024) penggunaan grup WhatsApp desa untuk mengumumkan jadwal gotong royong meningkatkan kehadiran warga hingga 35%.

Teknologi dapat menjadi alat mobilisasi partisipasi yang efektif jika digunakan secara tepat, namun perlu pengendalian agar tidak menggantikan interaksi tatap muka.

4.6.5 Migrasi, Urbanisasi, dan Perubahan Demografi

Perubahan demografi akibat migrasi dan urbanisasi mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja untuk kegiatan gotong royong. Urbanisasi juga membawa perubahan nilai yang dapat mengikis solidaritas sosial.

Migrasi pemuda ke kota mengurangi jumlah tenaga kerja produktif di desa. Urbanisasi membawa nilai individualisme yang melemahkan rasa kebersamaan. Peningkatan jumlah lansia membatasi kemampuan fisik warga untuk ikut serta.

Menurut Soekanto, (2020) menjelaskan bahwa urbanisasi mengubah pola interaksi masyarakat desa dan melemahkan kohesi sosial. Zega, (2022) di Pulau Nias menemukan bahwa migrasi pemuda menyebabkan penurunan partisipasi gotong royong hingga 40%.

Di Desa Lolowau Gea, (2024) program Pulang Kampung Gotong Royong yang melibatkan perantau terbukti efektif meningkatkan jumlah peserta kegiatan tahunan.

Migrasi, urbanisasi, dan perubahan demografi menurunkan kapasitas partisipasi gotong royong, namun program yang melibatkan komunitas perantau dapat menjadi solusi inovatif.

4.6.4 Temuan Penting Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis dengan pendekatan tematik, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan kunci sebagai berikut:

1. Pelibatan Masyarakat yang Konsisten dan Partisipatif
 - a) Pemerintah Desa Hiligara secara rutin mengadakan musyawarah desa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan gotong royong.
 - b) Keterlibatan warga tidak hanya pada pelaksanaan, tetapi juga pada tahap perencanaan, yang menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif.
 - c) Keteladanan perangkat desa, seperti ikut bekerja di lapangan, menjadi faktor pendorong tingginya partisipasi.
2. Peran Sentral Tokoh Adat dan Lembaga Lokal
 - a) Tokoh adat dan lembaga desa seperti PKK, Karang Taruna, dan LPM berperan besar dalam memobilisasi warga.
 - b) Kehadiran tokoh adat memberi legitimasi sosial dan memperkuat rasa kewajiban moral untuk berpartisipasi.
 - c) Kolaborasi pemerintah desa dan lembaga lokal memperluas jangkauan partisipasi hingga ke semua kelompok masyarakat.
3. Kendala Ekonomi sebagai Hambatan Utama

- a) Warga yang bekerja di luar desa atau di sektor informal dengan penghasilan harian cenderung sulit meluangkan waktu untuk kegiatan gotong royong.
 - b) Kesibukan ekonomi mengurangi partisipasi kaum ibu dan pekerja produktif.
 - c) Meskipun demikian, strategi seperti penjadwalan fleksibel dan pemberian insentif terbukti dapat meningkatkan partisipasi.
4. Pengaruh Teknologi yang Bersifat Ambivalen
- a) Media sosial dan teknologi komunikasi memudahkan koordinasi kegiatan, tetapi juga mengurangi interaksi tatap muka.
 - b) Generasi muda lebih sering terlibat dalam aktivitas daring dibandingkan kegiatan fisik seperti gotong royong.
 - c) Pemanfaatan grup WhatsApp desa terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi jika digunakan secara tepat.
5. Dampak Migrasi, Urbanisasi, dan Perubahan Demografi
- a) Migrasi pemuda ke kota menyebabkan berkurangnya tenaga kerja produktif untuk kegiatan gotong royong.
 - b) Urbanisasi membawa nilai individualisme yang melemahkan solidaritas sosial tradisional.
 - c) Peningkatan jumlah lansia di desa berdampak pada keterbatasan tenaga kerja fisik.
 - d) Inisiatif seperti “Pulang Kampung Gotong Royong” yang melibatkan perantau terbukti dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga.

4.7 Pembahasan

Pembahasan ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci dan pendukung yang telah dianalisis secara tematik. Selanjutnya, data lapangan dibandingkan dengan teori yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka

untuk mengetahui konsistensi atau perbedaan. Pembahasan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

4.7.1 Peran Pemerintah Desa dalam Mempertahankan Budaya Gotong Royong

Perubahan budaya gotong royong di Desa Hiligara merupakan fenomena yang menimbulkan perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, dan demografi. Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai fasilitator, motivator, dan penggerak utama dalam mempertahankan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat setempat.

Pelibatan masyarakat secara partisipatif: Pemerintah desa rutin mengadakan musyawarah desa yang melibatkan semua unsur masyarakat untuk merencanakan kegiatan gotong royong. Hal ini sesuai dengan pendapat Supriyadi & Hartati, (2022) bahwa partisipasi aktif warga akan tumbuh jika dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Peran teladan aparat desa: Aparat desa tidak hanya memberikan instruksi tetapi ikut bekerja langsung dalam kegiatan, sehingga memotivasi warga untuk berpartisipasi.

1. Kolaborasi dengan tokoh adat dan lembaga lokal: Kolaborasi ini terbukti efektif memobilisasi warga, sejalan dengan teori Arnstein, (2019) tentang pentingnya legitimasi sosial dalam partisipasi publik.
2. Pemanfaatan teknologi untuk koordinasi: Grup WhatsApp digunakan untuk mengumumkan jadwal dan mengingatkan warga, meski perlu diimbangi dengan interaksi tatap muka.

Temuan ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa tidak hanya administratif, tetapi juga sosial-kultural. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan mempertahankan budaya gotong royong di tengah perubahan zaman.

Pemerintah Desa Hiligara mampu menjadi penggerak utama dalam mempertahankan budaya gotong royong dengan memadukan pendekatan

partisipatif, kolaborasi lintas elemen masyarakat, dan pemanfaatan teknologi secara bijak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Hidayat & Sari, (2022) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa sangat menentukan keberhasilan kegiatan gotong royong di tengah tantangan modernisasi. Demikian pula, menurut Nugroho & Lestari, (2023) menekankan bahwa peran pemerintah desa sebagai community organizer efektif dalam memperkuat partisipasi masyarakat ketika dilakukan secara kolaboratif dengan tokoh adat dan lembaga lokal.

Jika dikaitkan dengan teori perubahan sosial menurut Soekanto, (2017) upaya pemerintah desa di Desa Hiligara mencerminkan strategi adaptif dalam menghadapi perubahan nilai dan norma akibat perkembangan teknologi serta pergeseran struktur sosial. Akan tetapi, efektivitas peran ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena partisipasi generasi muda belum optimal dan masih ada kecenderungan warga yang lebih fokus pada pekerjaan pribadi daripada kegiatan sosial.

Dengan demikian, meskipun pemerintah desa telah memadukan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi, tetap dibutuhkan inovasi lanjutan agar budaya gotong royong benar-benar dapat dipertahankan secara berkelanjutan di tengah perubahan zaman.

Selain itu, pemerintah desa juga berperan melalui pendekatan yang lebih persuasif dengan cara mengajak masyarakat untuk bekerjasama secara langsung dalam setiap kegiatan gotong royong. Pendekatan ini dilakukan tidak hanya dalam bentuk sosialisasi umum, tetapi juga melalui komunikasi personal dengan tokoh masyarakat, pemuda, serta kelompok-kelompok lokal agar tercipta rasa kebersamaan dan kepemilikan bersama terhadap kegiatan desa. Upaya ini dinilai efektif dalam membangun kepercayaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Di samping itu, pemerintah desa tidak hanya mengandalkan pemberian insentif sebagai bentuk motivasi, tetapi juga memberikan *reward* berupa

penghargaan pada momen-momen khusus, seperti perayaan Hari Kemerdekaan, HUT Desa, maupun hari-hari besar keagamaan. Penghargaan tersebut dapat berupa piagam, hadiah sederhana, atau apresiasi publik kepada kelompok/individu yang berperan aktif dalam menjaga budaya gotong royong. Bentuk penghargaan ini diyakini mampu meningkatkan semangat kebersamaan sekaligus menumbuhkan kebanggaan kolektif dalam masyarakat Desa Hiligara.

4.7.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Budaya Gotong Royong serta Upaya Pemerintah Desa dalam Mengatasinya

Perubahan budaya gotong royong di Desa Hiligara disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat internal dan eksternal. Faktor-faktor ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi, bentuk pelaksanaan, dan keberlanjutan tradisi gotong royong.

1. **Faktor Ekonomi:** Banyak warga bekerja di luar desa atau memiliki pekerjaan harian sehingga sulit meluangkan waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri & Haryono, (2022) yang menyebutkan bahwa ketersediaan waktu sangat memengaruhi partisipasi sosial.
2. **Pengaruh Teknologi:** Media sosial mempermudah koordinasi, namun juga mengurangi interaksi tatap muka dan kedekatan emosional antarwarga. Temuan ini diperkuat oleh Marhayati, (2021) yang menunjukkan bahwa generasi muda lebih banyak menghabiskan waktu pada aktivitas digital daripada keterlibatan dalam kegiatan sosial tradisional seperti kerja bakti.
3. **Migrasi dan Urbanisasi:** Migrasi pemuda ke kota mengurangi tenaga kerja produktif, sedangkan urbanisasi membawa nilai individualisme yang dapat mengikis solidaritas. Temuan ini didukung oleh Zega, (2022) yang menyatakan migrasi dapat menurunkan partisipasi gotong royong hingga 40%.
4. **Perubahan Demografi:** Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia membatasi tenaga kerja untuk kegiatan fisik. Hal ini sesuai dengan penelitian Pamungkas et al., (2022) yang menegaskan bahwa peningkatan jumlah

penduduk lansia berimplikasi pada melemahnya partisipasi aktif dalam kegiatan sosial.

5. Faktor Budaya Lokal: Adanya pengaruh budaya luar membuat sebagian generasi muda kurang tertarik pada gotong royong tradisional. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui pandangan Koentjaraningrat, (2020) yang menyatakan bahwa globalisasi berpotensi melemahkan nilai-nilai budaya lokal apabila tidak diimbangi dengan upaya pelestarian.

Faktor ekonomi dan migrasi memiliki pengaruh paling signifikan terhadap menurunnya partisipasi. Namun, amun demikian, jika dikaitkan dengan teori perubahan sosial dari Soekanto, (2017) perubahan ini merupakan konsekuensi logis dari modernisasi yang menggeser nilai tradisional menuju nilai praktis dan individualistik. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Durkheim tentang pergeseran dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik, di mana masyarakat lebih terikat pada kepentingan ekonomi daripada ikatan komunal. Sementara itu, menurut Giddens, (2020) modernisasi melahirkan fenomena *disembedding*, yaitu keterputusan nilai-nilai lokal akibat penetrasi sistem global yang mengubah pola interaksi sosial masyarakat.

Secara kritis, meskipun faktor ekonomi dan migrasi menjadi penyebab paling dominan, pengaruh teknologi dan budaya luar mempercepat proses pergeseran nilai. Generasi muda khususnya menunjukkan kecenderungan menurunkan prioritas terhadap gotong royong, dan lebih memilih aktivitas yang dianggap relevan dengan gaya hidup modern. Apabila tidak ada strategi yang tepat, maka nilai kebersamaan ini dapat semakin memudar di masa mendatang.

Strategi adaptif seperti penjadwalan fleksibel, pelibatan perantau, atau pemberian insentif, kemudian integrasi gotong royong dengan program pembangunan desa, pemanfaatan media sosial secara kreatif untuk kampanye budaya lokal, serta pendidikan budaya bagi generasi muda melalui sekolah dan kegiatan karang taruna. Dengan cara ini, nilai gotong royong dapat dipertahankan sebagai identitas sosial yang relevan di tengah tantangan zaman.

4.7.3 Upaya Pemerintah Desa dalam Mempertahankan Budaya Gotong Royong

Upaya pemerintah desa dalam mempertahankan budaya gotong royong di Desa Hiligara berfokus pada penerapan langkah-langkah praktis yang menjawab tantangan perubahan sosial, ekonomi, dan demografi yang ada. Jika pada bagian sebelumnya dibahas mengenai peran pemerintah desa secara konseptual sebagai fasilitator, motivator, dan penggerak, maka pada bagian ini lebih menekankan pada strategi dan implementasi nyata yang dilakukan di lapangan.

1. Pelaksanaan Musyawarah Desa: Pemerintah desa secara rutin menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan jadwal kerja bakti dan jenis kegiatan gotong royong. Cara ini terbukti efektif meningkatkan partisipasi karena warga merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan Hidayat & Sari, (2022).
2. Pemberian Insentif dan Dukungan Logistik: Untuk menjaga antusiasme warga, pemerintah desa memberikan konsumsi, alat kerja, hingga penghargaan simbolis bagi masyarakat yang berpartisipasi aktif. Pamungkas et al., (2022) menegaskan bahwa insentif memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi sosial, meskipun motivasi utama tetap berasal dari nilai kebersamaan.
3. Pemanfaatan Teknologi untuk Koordinasi: Media sosial, khususnya grup WhatsApp, dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan mengingatkan jadwal kegiatan. Nugroho & Lestari, (2023) menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dapat memperluas jangkauan partisipasi, tetapi tetap perlu diimbangi dengan interaksi tatap muka agar kedekatan sosial tetap terjaga.
4. Kolaborasi dengan Lembaga Lokal dan Pemuda: Pemerintah desa menggandeng tokoh adat, tokoh agama, serta karang taruna dalam kegiatan gotong royong. Kolaborasi ini memperluas basis partisipasi sekaligus menjadi sarana pendidikan budaya bagi generasi muda.

5. Integrasi dengan Program Pembangunan Desa: Kegiatan gotong royong tidak berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan dengan program pembangunan seperti perbaikan jalan, kebersihan lingkungan, dan pembangunan fasilitas umum. Dengan demikian, gotong royong bukan hanya tradisi sosial, tetapi juga menjadi bagian dari agenda pembangunan desa yang berkelanjutan.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya mempertahankan gotong royong sebagai nilai tradisional, tetapi juga menyesuaikannya dengan tantangan zaman. Hal ini sejalan dengan pandangan Durkheim bahwa solidaritas sosial dapat dipertahankan melalui adaptasi nilai kolektif dalam konteks modernisasi. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama rendahnya partisipasi generasi muda yang cenderung lebih fokus pada aktivitas individual. Oleh karena itu, diperlukan inovasi lanjutan berupa pendidikan budaya di sekolah, pemberdayaan karang taruna, serta kampanye digital yang menekankan pentingnya gotong royong sebagai identitas sosial masyarakat Desa Hiligara.

4.8 Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas secara mendalam tentang peran pemerintah desa dalam menghadapi perubahan budaya gotong royong di Desa Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan. Temuan-temuan lapangan menunjukkan adanya pergeseran signifikan pada tingkat partisipasi masyarakat, khususnya akibat faktor ekonomi, migrasi, teknologi, dan perubahan demografi. Namun, penelitian ini juga memperlihatkan adanya strategi adaptif yang dilakukan pemerintah desa melalui musyawarah, kolaborasi, pemberian insentif, serta pemanfaatan teknologi. Temuan ini tidak hanya menggambarkan kondisi empiris di lapangan, tetapi juga memberikan implikasi teoritis, praktis, dan kebijakan yang penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pelaksanaan pembangunan berbasis budaya lokal.

4.8.1 Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang pelestarian budaya gotong royong di tengah dinamika modernisasi. Penelitian ini mempertegas bahwa peran pemerintah desa yang efektif melibatkan pendekatan partisipatif, keteladanan aparat, kolaborasi dengan tokoh adat/lembaga lokal, serta pemanfaatan teknologi sesuai konteks desa. Hal ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori kepemimpinan partisipatif dan community development dalam masyarakat rural.

Lebih jauh, penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menyoroti faktor migrasi, urbanisasi, dan perubahan demografi sebagai variabel signifikan yang memengaruhi keberlangsungan gotong royong. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kerangka analisis teori perubahan sosial Soekanto, (2017) sekaligus mendukung teori Durkheim tentang pergeseran solidaritas dari mekanik ke organik. Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan pandangan Giddens, (2020) tentang modernisasi yang mendorong “*disembedding*”, yaitu terlepasnya tradisi dari konteks sosialnya.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu (Supriyadi & Hartati, 2022; Zega, 2022; Laoli, 2024), penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) berupa penekanan pada strategi integrasi gotong royong dengan program pembangunan desa, yang sebelumnya belum banyak dikaji.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendukung, tetapi juga memperluas pemahaman teoritis tentang daya tahan budaya lokal dalam menghadapi modernisasi.

4.8.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lokal dalam mempertahankan budaya gotong royong di tengah tantangan sosial-ekonomi. Beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan antara lain:

1. Regulasi Desa; Membuat peraturan desa yang mengatur kewajiban gotong royong berkala sebagai instrumen kelembagaan, untuk menjamin keberlanjutan.
2. Pendanaan Khusus; Mengalokasikan dana desa untuk mendukung kegiatan sosial, seperti penyediaan peralatan, konsumsi, serta insentif non-tunai. Hal ini penting karena faktor ekonomi terbukti memengaruhi tingkat partisipasi.
3. Penguatan Lembaga Lokal; Memperkuat peran tokoh adat, PKK, Karang Taruna, dan LPM dalam memobilisasi warga. Hal ini sejalan dengan penelitian Pamungkas et al., (2022) bahwa aktor lokal berperan penting dalam mempertahankan partisipasi sosial.
4. Pemanfaatan Teknologi Secara Bijak; Menggunakan media sosial untuk koordinasi tanpa mengabaikan interaksi tatap muka yang memperkuat ikatan emosional.
5. Strategi Generasi Muda & Perantau; Menyusun program khusus yang melibatkan pemuda dan perantau, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi generasi muda masih rendah akibat migrasi dan aktivitas digital.

Implikasi praktis ini menunjukkan bahwa upaya mempertahankan gotong royong bukan sekadar mempertahankan tradisi, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan desa berkelanjutan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

4.8.3 Implikasi Kebijakan

Pada tingkat kebijakan, hasil penelitian ini memiliki relevansi penting bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis nilai lokal. Beberapa implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Replikasi Model Desa Hiligara. Pemerintah kabupaten dapat mereplikasi model partisipasi Desa Hiligara ke desa-desa lain melalui program pendampingan berbasis nilai gotong royong.

2. Regulasi Daerah. Penyusunan peraturan daerah yang mendorong setiap desa memiliki regulasi khusus terkait gotong royong, sehingga nilai ini menjadi bagian dari tata kelola desa.
3. Integrasi Pembangunan. Mengintegrasikan kegiatan gotong royong dengan pembangunan infrastruktur, kebersihan lingkungan, dan program sosial yang dibiayai dari APBD, agar gotong royong menjadi sarana pembangunan bersama.
4. Program Perantau. Membuat program tahunan seperti “Pulang Kampung Gotong Royong” yang dikoordinasikan oleh pemerintah kabupaten, sehingga partisipasi sosial warga perantau tetap terjaga.
5. Mitigasi Migrasi & Urbanisasi. Menyusun kebijakan mitigasi dampak migrasi terhadap partisipasi sosial di desa, misalnya melalui pemberdayaan kelompok produktif yang tersisa atau skema padat karya berbasis desa.

Implikasi kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* (partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi), karena menempatkan masyarakat desa sebagai aktor utama pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan masukan strategis agar nilai gotong royong tetap relevan dan berdaya guna dalam konteks pembangunan desa dan daerah.